



**PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT, PELAKSANAAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP
PENGUNGKAPAN KECURANGAN PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIODE 2016 – 2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

CORY FATJAYANTI GULO

1615100313

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Analisis penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system* secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan tahunan dari masing-masing perusahaan sampel, yang dipublikasikan melalui website www.idx.go.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif, dengan pengujian asumsi klasik dan regresi linier berganda. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *puposive sampling* dengan total sampel sebanyak 9 perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data dari tahun 2016 – 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} -2,027 < t_{tabel} 2,036$ dan signifikan $0,031 < 0,05$. Tata kelola perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} -4,395 < t_{tabel} 2,036$ dan signifikan $0,000 < 0,05$. *Whistleblowing system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} -2,199 < t_{tabel} 2,036$ dan signifikan $0,035 < 0,05$. Komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $F_{hitung} 8,152 > F_{tabel} 2,90$ dan signifikan $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci : Komite Audit, Tata Kelola Perusahaan, *Whistleblowing System* dan Pengungkapan Kecurangan

ABSTRACT

The research analysis aims to determine whether the audit committee, corporate governance and whistleblowing system partially and simultaneously have a significant effect on the disclosure of fraud in the Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The data used are the annual reports of each sample company, published on the website www.idx.go.id. The method of analysis used in this research is the associative method, by testing classical assumptions and multiple linear regression. The sampling method used was purposive sampling with a total sample of 9 Food and Beverage Sub Sector Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange and data from 2016 - 2019. The results of this study indicate that the audit committee partially has a significant effect on the disclosure of fraud in companies. Manufacturing in the Food and Beverage Sub-Sector listed on the Indonesia Stock Exchange, where $t_{count} -2.027 < t_{table} 2.036$ and significant $0.031 < 0.05$. Partial corporate governance has a significant effect on the disclosure of fraud in the Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange, where $t_{count} -4.395 < t_{table} 2.036$ and significant $0.000 < 0.05$. Whistleblowing system partially has a significant effect on the disclosure of fraud in the Food and Beverage Sub Sector Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange, where $t_{count} -2.199 < t_{table} 2.036$ and significant $0.035 < 0.05$. Audit committee, corporate governance and whistleblowing system simultaneously have a significant effect on the disclosure of fraud in the Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange, where $F_{count} 8,152 > F_{table} 2,90$ and significant $0,000 < 0,05$.

Keywords : Audit Committee, Corporate Governance, Whistleblowing System and Fraud Disclosure

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	47
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	68
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas	69

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Kecurangan (<i>Fraud</i>).....	8
2.1.2 Komite Audit.....	21
2.1.3 Tata Kelola Perusahaan.....	29
2.1.4 <i>Whistleblowing System</i>	41
2.2 Penelitian Terdahulu	44
2.3 Kerangka Konseptual	45
2.4 Hipotesis.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	49
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	49
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	50
3.4 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6 Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	58
4.1.1 Gambaran Tentang Perusahaan.....	58
4.1.2 Pengujian Asumsi Klasik.....	68

4.1.3	Regresi Linier Berganda	72
4.1.4	Uji Hipotesis.....	73
4.2	Pembahasan.....	75
4.2.1	Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan Kecurangan	75
4.2.2	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan.....	76
4.2.3	Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pengungkapan Kecurangan.....	77
4.2.4	Pengaruh Komite Audit, Tata Kelola Perusahaan dan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap Pengungkapan Kecurangan.....	78
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	44
Tabel 3.1 Skedul Proses penelitian	49
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel.....	50
Tabel 3.3 Populasi Perusahaan.....	51
Tabel 3.3 Sampel Perusahaan.....	52
Tabel 4.1 Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	70
Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas	70
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi	71
Tabel 4.4 Regresi Linier Berganda	72
Tabel 4.5 Uji Simultan	73
Tabel 4.6 Uji Parsial.....	74
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi.....	75

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Peran Komite Audit, Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Dan Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2019”** ini dengan baik, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Suroso, S.E., M.Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Drs. Abdul Hasyim, BB, Ak., M.M, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Kepada yang tercinta kedua Orang tua ku yakni Bapak dan Mama serta kedua adik-adikku, Linus dan Veronica, terimakasih atas doa-doa dan bantuan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis.
7. Kepada calon suamiku, Novis Terisman Zebua, S.Akun., terimakasih atas dorongan semangat dan bantuan secara moril dan materil kepada penulis.
8. Kepada teman-temanku, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Agustus 2020
Penulis

Cory Fatjayanti Gulo
1615100313

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus Kecurangan (*fraud*) merupakan topik hangat yang sering menjadi bahan utama berita baik di media masa maupun media elektronik. Kecurangan dapat terjadi dimana saja seperti organisasi non profit, perusahaan maupun Lembaga pemerintahan. *Fraud* merupakan bahaya laten yang mengancam dunia karena bukan hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga negara-negara maju. Setiap tahun rata-rata 5% dari pendapatan organisasi menjadi korban kecurangan (*fraud*). Kecurangan dapat dibuktikan dengan adanya penyalahgunaan asset, manipulasi pajak, laporan keuangan, dan penyusunan individu ke lembaga pemerintahan. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kecurangan yaitu komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system*.

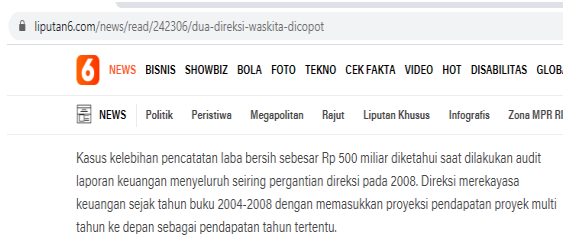
Komite audit yang terdiri setidaknya satu anggota memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi akan memperkecil kemungkinan kecurangan. Semakin banyak komite audit yang memiliki keahlian keuangan maka efektivitas komite audit akan semakin meningkat. Hal ini terkait dengan peran dan tanggung jawab komite audit tentang pelaporan keuangan dan manajemen. Keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit akan membantu mendeteksi potensi kecurangan yang mungkin atau sudah terjadi melalui pemeriksaan laporan keuangan. Dengan adanya Kerjasama penerapan Tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan visi perusahaan sebagai aparat pengawasan internal bertekad untuk ikut membantu terwujudnya *good governance* di korporat, pelayanan publik, serta

penanggulangan KKN melalui strategi pengawasannya yang bersifat preventif, represif, dan edukatif, sehingga dapat mendorong terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi katalisator untuk terwujudnya *Good Governance* sehingga akan mengurangi potensi kecurangan.

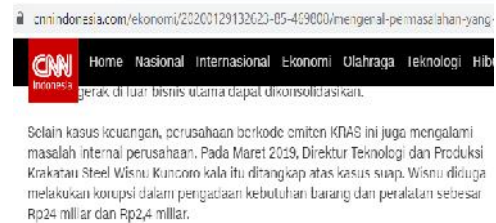
Salah satu tingkat efektivitas dari audit internal dapat dilihat dari keahlian keuangan kepala unit audit internal dan jumlah audit yang dilakukan dalam setahun . Audit internal juga melakukan tugasnya audit internal juga berpedoman kepada laporan – laporan yang masuk melalui *whistleblowing system*. Audit internal akan melakukan audit investigative atas laporan – laporan yang terindikasi adanya praktik kecurangan (*fraud*). *Whistleblowing system* yang merupakan bagian dari pengendalian internal. Pelaksanaan pengendalian internal yang optimal mampu mendeteksi indikasi praktik kecurangan secara dini.

Terdapat masalah pada perusahaan Manufaktur dimana terjadi penggelembungan asset pada tahun 2004-2008 oleh PT. Waskita Karya Tbk sebesar 500 Milyar. Direksi merekayasa keuangan dengan memasukkan proyeksi pendapatan proyek multi tahun ke depan sebagai pendapatan tahun tertentu. Hal ini diketahui saat dilakukan audit laporan keuangan menyeluruh seiring pergantian direksi pada 2008. Selain itu terdapat pula korupsi pengadaan kebutuhan peralatan dan barang oleh direktur PT. Krakatau Steel pada tahun 2018 sebesar Rp.24 milyar dan Rp.2,4 Milyar yang tertangkap pada OTT oleh Kpk pada tahun 2019. Oleh sebab itu tata kelola perusahaan dianggap masih belum mampu mencegah praktik kecurangan yang terjadi pada berbagai organisasi. Hal ini pun disebabkan oleh waktu pendeteksian dan pengungkapan kecurangan yang

rata-rata masih relative lama yakni sekitar 12 bulan lebih. Terjadinya hal tersebut diakibatkan oleh kesalahan dalam tata kelola perusahaan.



Sumber : *Liputan6.com (2009)*



Sumber : *Cnnindonesia.com (2019)*

Oleh karena itu, judul penelitian yang akan diajukan adalah **“Pengaruh Peran Komite Audit, Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Dan Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2019”**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Terdapat masalah pada perusahaan Manufaktur dimana terjadi penggelembungan asset pada tahun 2004-2008 oleh PT. Waskita Karya Tbk sebesar 500 Milyar.
- b. Terdapat korupsi pengadaan kebutuhan peralatan dan barang oleh direktur PT. Krakatau Steel pada tahun 2018 sebesar Rp.24 milyar dan Rp.2,4 Milyar, oleh sebab itu tata Kelola perusahaan dianggap masih belum mampu mencegah praktik kecurangan yang terjadi pada berbagai organisasi. Hal ini pun disebabkan oleh waktu pendeteksian

dan pengungkapan kecurangan yang rata-rata masih relative lama yakni sekitar 12 bulan lebih.

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa focus untuk dilakukan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka Batasan masalah hanya pada pengaruh peran komite audit, pelaksanaan tata Kelola perusahaan dan whistleblowing system terhadap pengungkapan kecurangan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- b. Apakah tata Kelola perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- c. Apakah *whistleblowing system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

- d. Apakah komite audit, tata Kelola perusahaan dan *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk mengetahui apakah tata Kelola perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Untuk mengetahui apakah *whistleblowing system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- d. Untuk mengetahui apakah komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub

Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengetahui penilaian perusahaan yang tepat.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para investor mengenai nilai perusahaan dan menjadi salah satu cara pengambilan keputusan untuk melakukan investasi.

c. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama masa perkuliahan.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sebagai acuan dalam melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Luh Utami(2019), dengan judul efektivitas komite audit dan audit internal terhadap kasus kecurangan dengan *whistleblowing system* sebagai variable pemoderasi, sedangkan penelitian ini berjudul: pengaruh peran komite audit, pelaksanaan tata kelola perusahaan

dan whistleblowing system terhadap pengungkapan kecurangan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2019.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada:

- 1. Variabel Penelitian :** penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu efektivitas komite audit dan audit internal, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu kasus kecurangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system*, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu pengungkapan kecurangan.
- 2. Jumlah Data (n) :** penelitian terdahulu menggunakan sampel sebanyak 102 Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data dari tahun 2016 – 2017. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 9 perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data dari tahun 2016 – 2019.
- 3. Waktu Penelitian :** penelitian terdahulu dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian ini tahun 2020.
- 4. Lokasi Penelitian :** lokasi penelitian terdahulu di Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini dilakukan di perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kecurangan (*Fraud*)

2.1.1.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan/*Fraud* adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Menurut Albrecht(2017:45), “*Fraud* adalah sebagai suatu istilah yang umum, dan tidak mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah”.

Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan kecurangan, termasuk kejut, tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Batasan satu-satunya dalam mendefinisikan kecurangan adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia. Kecurangan (*Fraud*) adalah penipuan yang menyertakan elemen-elemen berikut:

1. Sebuah representasi.
2. Mengenai sesuatu yang bersifat material.

3. Sesuatu yang tidak benar.
4. Dan secara sengaja atau serampangan dilakukan kemudian.
5. Dipercaya.
6. Dapat ditindaklanjuti oleh korban.
7. Sehingga pada akhirnya korban menanggung kerugian.

Menurut Cressey (2015:16), “Kecurangan sebagai tindakan yang disengaja oleh individu di antaramanajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau illegal”.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Seksi 316, kecurangan merupakan konsep hukum yang luas, kepentingan auditor berkaitan secara khusus ke tindakan kecurangan yang berakibat terhadap salah saji material dalam laporan keuangan. Ada dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit atas laporan keuangan, yaitu :

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui para pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti yang disajikan berikut ini :
 - a. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.

- b. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi atau informasi signifikan.
 - c. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar harga barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

Internal fraud (tindakan penyelewangan di dalam perusahaan atau institusi) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. *Fraud Terhadap Aset (Asset Misappropriation)*-Singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan (institusi), entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tanpa ijin dari perusahaan. Seperti diketahui, aset perusahaan bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga *asset misappropriation* dikelompokkan menjadi 2 macam :
 - a. *Cash Misappropriation* – penyelewangan terhadap aset yang berupa kas.

- b. *Non-Cash Misappropriation* – penyelewangan terhadap aset yang berupa non-kas (Misalnya : menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi).
2. *Fraud Terhadap Laporan Keuangan (Fradulent Statements)* – ACFE membagi jenis *fraud* ini menjadi 2 macam, yaitu :
- a. *Financial*
 - b. *Non-financial*. Segala macam tindakan yang membuat laporan keuangan tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok *fraud* terhadap laporan keuangan, misalnya :
 - 1) Memalsukan bukti transaksi.
 - 2) Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.
 - 3) Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba.
 - 4) Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
 - 5) Menerapkan metode liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.
3. *Korupsi (Corruption)* – ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu :
- a. *Konflik kepentingan (conflict of interest)*- ini merupakan benturan kepentingan. Contoh sederhananya: seseorang atau kelompok orang didalam perusahaan (biasanya manajemen level) memiliki hubungan istimewa dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha).

Dikatakan memiliki hubungan istimewa karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat)

- b. Menyuap atau menerima suap – Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan *fraud*. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok *fraud* ini adalah : menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.

Terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan terdiri dari tiga hal yang sering disebut *the Fraud Triangle*. Layaknya sebuah segitiga yang saling berhubungan antara satu sudut dengan sudut lainnya, ketiga faktor tersebut :

1. Adanya tekanan atau dorongan untuk melakukan kecurangan

Manajemen atau pegawai melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan karena berada dibawah tekanan. misalnya, mencapai target laba tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.

2. Adanya peluang atau kesempatan untuk melaksanakan kecurangan

Seseorang didalam organisasi akan melakukan kecurangan apabila ia merasa yakin bahwa dirinya dapat menghindari pengendalian intern atau sistem dianggapnya tidak akan menemukan kecurangan yang dilakukannya.

3. Adanya rasionalisasi atau alasan pembenaran

Seseorang didalam organisasi yang melakukan tindakan kecurangan tersebut membuat pembenaran terhadap perilaku untuk berbuat

kecurangan yang dilakukannya. Artinya, orang yang melakukan kecurangan tersebut memiliki sikap, karakter atau nilai-nilai etika tertentu yang membuatnya secara sadar dan paham betul untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.

Kewajiban auditor untuk melaporkan terjadinya kecurangan adalah dalam hal atau kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Setiap auditor menetapkan adanya bukti terjadinya kecurangan meskipun kecil atau sedikit, maka masalah tersebut harus menjadikan perhatian bagi manajemen, biasanya serendah-rendahnya adalah satu tingkat di atas tingkatan dimana kecurangan tersebut terjadi.
2. Setiap terjadi kecurangan yang melibatkan pimpinan atau manajemen senior, atau kecurangan pada tingkatan apapun yang menyebabkan terjadinya salah saji yang material dalam laporan keuangan, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada komite audit atau Dewan Komisaris.
3. Auditor biasanya tidak diwajibkan baik oleh Kode Etik maupun aturan hukum untuk menyampaikan hal-hal yang terindikasi kecurangan tersebut kepada pihak-pihak luar. Meskipun demikian auditor mungkin harus mengungkapkannya juga dalam hal atau pihak-pihak sebagai berikut :
 - a. Sebagai tanggapan atas panggilan sidang pengadilan.
 - b. Sebagai tanggapan kepada Bursa Efek jika auditor menarik diri atau diberhentikan sebagai auditor perusahaan tersebut, atau apabila auditor telah melaporkan kecurangan dan tindakan melawan hukum lainnya kepada komite audit atau Dewan Komisaris tetapi mereka tidak melakukan tindakan yang menurut auditor harus diambil.

- c. Kepada auditor pengganti yang mengajukan pertanyaan padanya sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- d. Kepada penyandang dana atau agen tertentu sesuai dengan persyaratan untuk audit atas perusahaan yang memperoleh dana dari pemerintah.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (*Fraud*)

Faktor-faktor terjadinya kecurangan keuangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

1. Teori Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle*)

Menurut Noviani (2016:72), “Tiga kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva yang diuraikan dalam SAS 99 (AU 316) yang terdiri atas *Pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *razionalization* (rasionalisasi)”.

Banyak pakar yang mengemukakan mengenai konsep penyebab kecurangan, salah satu konsep penyebab kecurangan yang saat ini sudah digunakan secara luas dalam praktik Akuntan Publik yaitu konsep segitiga kecurangan. Sedangkan berdasarkan teori segitiga kecurangan merupakan teori yang harus dimasukkan ke dalam rencana audit kecurangan. Teori ini menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga elemen seperti tekanan, kesempatan, dan pembenaran.

Skema segitiga kecurangan terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*perceived opportunity*), dan juga pembenaran (*rationalization*)

a. *Pressure*

Dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah,

dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

Elemen tekanan (*pressure*) adalah tekanan atau dorongan orang untuk melakukan kecurangan. Dalam hal keuangan, misalnya penggelapan uang perusahaan yang bermula dari suatu tekanan yang menghimpit, maka orang yang melakukan hal tersebut sedang mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Konsep yang penting di sini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi dengan oranglain. Sedangkan tekanan dalam hal non keuangan juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, misalnya tindakan untuk menutupi kinerja yang buruk karena tuntutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik.

b. *Opportunity*

Peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi, biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, atay penyalahgunaan wewenang. Di antara tiga elemen *fraud* triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

Elemen kesempatan (*perceived opportunity*) adalah peluang memungkinkan terjadinya kecurangan. Ada dua persepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information*, yang merupakan

pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, misalnya pengalaman orang lain melakukan *fraud* dan tidak ketahuan atau tidak dihukum atau terkena sanksi. Kedua, *technical skill* atau keahlian/ keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Ini biasanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki orang itu dan yang menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut. Dari ketiga elemen dalam *fraud triangle*, kesempatan memiliki kontrol yang posisi paling atas. Organisasi perlu membangun sebuah proses, prosedur dan kontrol yang membuat karyawan tidak dapat melakukan kecurangan dan yang efektif mendeteksi aktivitas kecurangan jika hal itu terjadi.

c. *Rationalization*

Elemen pembenaran (*rationalization*) menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. *Rationalization* diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, *rationalization* ini ditinggalkan, karena tidak diperlukan lagi.

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya:

- 1) Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya.
- 2) Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapat lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang.
- 3) Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil sedikit bagian dari keuntungan.

Dari ketiga elemen *fraud triangle*, kesempatan mengendalikan *fraud* terbesar adalah *opportunity*. Organisasi seharusnya peduli dan serius serta mampu untuk sebuah proses, prosedur dan kontrol serta tata kelola yang membuat semua personil dalam organisasi tidak memiliki kesempatan melakukan *fraud* dan yang efektif dapat mendeteksi *fraud* jika hal ini terjadi. Jika karyawan dalam perusahaan memiliki integritas yang rendah dan perusahaan tidak menerapkan pengendalian internal yang kuat sehingga memunculkan kesempatan melakukan *fraud* maka resiko terjadinya *fraud* dalam perusahaan tersebut akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya.

2. Teori GONE (*Gone Theory*)

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, atau yang lebih dikenal sebagai teori GONE, yaitu:

a. *Greed* (Keserakahan)

Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang.

b. *Opportunity* (Kesempatan)

Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.

c. *Need* (Kebutuhan)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar.

d. *Exposure* (Pengungkapan)

Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut, semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan ke dalam tiga kelompok (*fraud tree*), pohon ini menggambarkan hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya, yaitu:

1. *Corruption*

Definisi dari corruption (korupsi) dalam perundang-undangan berbeda dengan istilah korupsi disini, walaupun memiliki kata yang sama.

2. *Asset misappropriation*

Asset misappropriation atau “pengambilan” asset secara illegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun dalam istilah hukum, mengambil asset secara illegal (tidak sah, atau melawan hukum) yang

dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi asset tersebut, disebut menggelapkan. Istilah pencurian disini disebut *larcency*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya adalah *embezzlement*. Contohnya, pencurian di gudang oleh kepala gudang disebut *embezzlement*.

3. *Fraudulent statements*

Terdapat dua macam yaitu, *fraud* dalam laporan non keuangan, berupa salah saji (*misstatements* baik *overstatements* maupun *understatements*), dan *fraud* dalam laporan keuangan, berupa penyampaian laporan non keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaa yang sebenarnya, seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan keadaan.

2.1.1.4 Klarifikasi Kecurangan (*Fraud*)

Secara skematis *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari *fraud* dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. *Occupational fraud tree* ini memiliki tiga cabang utama:

1. Korupsi (*Corruption*)

Corrupt” sebagai *spoiled, tainted, depraved, debased, morally degenerate*. Skema korupsi (*corruption schemes*) dapat dipecah menjadi empat klasifikasi:

- a. pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)
- b. Suap (*bribery*)
- c. Pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan (4) pemerasan ekonomi (*economic extortion*).

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kas (*cash misappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk *skimming*, *larceny*, atau *fraudulent disbursement*.
- b. Penyalahgunaan non-kas (*non-cash missappropriation*) yang dapat dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian (*larceny*) terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.

3. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*)

Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu

- a. Mencatat pendapatan-pendapatan fiktif (*fictitious revenues*)
- b. Mencatat pendapatan (*revenue*) dan/atau beban (*expenses*) dalam periode yang tidak tepat.
- c. Menyembunyikan kewajiban dan beban (*concealed liabilities and expenses*) yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah kewajiban dan beban agar perusahaan tampak lebih menguntungkan.
- d. Menghilangkan informasi atau mencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan (*improper disclosure*).
- e. Menilai aset dengan tidak tepat (*improper asset valuation*).

Statements on Auditing Standards No.99 AU section 316 menyebutkan bahwa tiga kondisi yang secara umum menyebabkan kecurangan (*fraud*) terjadi, yaitu:

- a. adanya dorongan atau tekanan (*incentive or pressure*) yang menjadi motivasi bagi pelaku kecurangan (*fraud*) untuk melakukan kecurangan (*fraud*).
- b. Adanya peluang atau kesempatan (*opportunity*) yang mendukung pelaku untuk melakukan kecurangan (*fraud*).
- c. Adanya rasionalisasi (*razionalization*), yaitu pembenaran terhadap perilaku untuk berbuat kecurangan oleh pihak-pihak yang melakukan tindakan kecurangan tersebut.

Menurut Albrecht (2017:49), “indikator pengungkapan kecurangan adalah sebagai berikut”:

Pengungkapan Kecurangan = Jumlah Kasus Kecurangan Yang Dilaporkan Dalam Periode Tersebut

2.1.2 Komite Audit

2.1.2.1 Pengertian Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik Bapepam melalui Surat Edaran Bapepam No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan imbauan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang

independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite di bawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, dan komite kebijakan *corporate governance*. Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEJ Nomor KEP-339/BEJ/07-2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efeknya komite audit.

Menurut Suginam (2017:37), “Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris”.

Dewan komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen. Menurut Suginam (2017:38), “Indikator komite audit adalah sebagai berikut”:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah Anggota Independen}}{\text{Jumlah Anggota}} \times 100\%$$

2.1.2.2 Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit

Peran dan tanggung jawab komite audit akan berlainan tergantung kondisi suatu perusahaan tertentu, namun pada dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang

pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen. Peran dan tanggungjawab komite audit yaitu:

1. Pelaporan Keuangan

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite audit adalah:

- a. Pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi.
- b. Mengawasi audit laporan keuangan eksternal dan menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

2. Manajemen Risiko dan Kontrol

Dalam hal manajemen risiko dan kontrol, peran dan tanggungjawab komite audit adalah:

- a. Mengawasi proses manajemen risiko dan kontrol, termasuk identifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk mengecilkan risiko tersebut.
- b. Mengawasi laporan auditor internal dan auditor eksternal untuk memastikan bahwa semua bidang kunci risiko dan kontrol diperhatikan.
- c. Menjamin bahwa pihak manajemen melaksanakan semua rekomendasi yang terkait dengan risiko dan kontrol, yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal.

3. *Corporate Governance*

Tanggungjawab komite audit di bidang *corporate governance* adalah memberikan kepastian, bahwa perusahaan tunduk pada undang-undang

dan peraturan yang berlaku, dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap benturan kepentingan pegawai. Dalam hal *corporate governance* peran dan tanggung jawab komite audit harus termasuk juga:

- a. Mengawasi proses *corporate governance*
- b. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*
- c. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan
- d. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- e. Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya.

2.1.2.3 Struktur Komite Audit

Struktur komite audit di Indonesia diatur dalam Keputusan KetuaBAPEPAM Nomor Kep-41/PM/2003 tentang Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS).
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit.

Rekomendasi yang dibentuk oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* adalah penting bahwa perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini disebabkan

karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

Persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Bukan merupakan orang dari kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit, atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan dalam enam bulan terakhir.
6. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir.
7. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
8. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.

9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

2.1.2.4 Independensi Komite Audit

Kinerja komite audit menjadi efektif jika para anggotanya memiliki kemandirian dalam menyatakan sikap dan pendapat. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, independensi dari setiap anggota komite audit diukur dengan persyaratan:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non-audit atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan.
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan.
3. Tidak memiliki saham perusahaan secara langsung.

Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif.

2.1.2.5 Pertemuan Komite Audit

Audit committee charter adalah suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggungjawab, dan wewenang serta struktur komite audit yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh dewan komisaris. Dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, tercantum bahwa komite

auditakan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Berdasarkan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan rapat paling sedikit setiap tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun.

Komite audit dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam notulen rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda pertemuan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem pengendalian internal.

2.1.2.6 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi komite audit diukur berdasarkan latar belakang pendidikan keuangan dan pengalaman kerja yang dimiliki. Anggotakomite audit disyaratkan

independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan. Keberadaan anggota komite audit yang memiliki kemampuan atau pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan sudah disyaratkan oleh BEJ, akan tetapi belum menjelaskan secara detail mengenai kriteria orang yang mempunyai kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan.

Pengukuran latar belakang pendidikan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa minimal salah seorang dari anggota komite audit adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Latar belakang pendidikan dapat berasal dari lulusan fakultas ekonomi bergelarsarjana muda, sarjana, magister, dan doktor dari universitas dalam negeri maupun luar negeri atau pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan nonformal yang berkaitan dengan kompetensi keuangan dan administrasi bisnis.

Sedangkan pengukuran pengalaman komite audit berdasarkan pedoman FCGI menyatakan bahwa paling sedikit satu orang anggota komite audit merupakan profesional yang memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnisnya, memiliki pemahaman mengenai risiko dan kontrol, serta mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan. Pengalaman di bidang keuangan dapat dilihat pada profil anggota komite audit yang sedang atau pernah bekerja dalam bidang audit, perbankan, keuangan, menjadi akademisi akuntansi pada universitas dalam negeri atau luar negeri, dan menjabat sebagai anggota komite audit pada perusahaan lain.

Securities and Exchange Commission merumuskan kriteria "*financial expert*" dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CFO, *controller*, *chief accounting officer*, atau posisi yang sejenis.
2. Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan.
3. Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan.
4. Pengalaman dalam pengendalian internal.
5. Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates*), *accruals*, dan cadangan (*reserves*).

2.1.3 Tata Kelola Perusahaan

2.1.3.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya) dalam suatu negara serta penggunaan sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurut Sagara (2015:62), “Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi”.

Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Forum *For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* : *Corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan intern dan ekstern

lainya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Komite *Cadbury* mendefinisikan *corporate governance*: *Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan pertama, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan dan yang kedua, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai : *Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as, the board managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.*

Tulisan OECD mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mengisyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan atau pemegang saham

dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut : *Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah - kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber - sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara secara keseluruhan.

Dikalangan pebisnis, secara umum *good corporate governance* (GCG) diartikan sebagai tata kelola perusahaan. GCG di artikan pula sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003). Peraturan Bank Indonesia Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mendefinisikan Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*).

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan

meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder' value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) seperti kreditor, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Menurut Sagara (2015:65), “Indikator tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) adalah sebagai berikut”:

Tata Kelola Perusahaan = Ln Anggota Dewan Direksi

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yang terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Tata Kelola Bank Umum tanggal 17 Maret 2017 antara lain:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Contoh Pertama, Seorang Administrasi Kredit Briguna memberikan informasi terkait prosedur pengajuan Kredit Briguna kepada Nasabah secara terbuka dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank; Kedua, Ketersediaan Brosur/*Booklet/Starterpack* terkait informasi Produk dan/atau jasa bank di unit kerja.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Yaitu fungsi struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan secara efektif. Contoh Pertama, Memberikan tugas atau pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bawahan.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Independency* (kemandirian)

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contoh Pertama, Menyampaikan laporan-laporan unit kerja secara akurat, tepat waktu dan menurut kondisi sebenarnya sesuai ketentuan yang berlaku; Kedua, Selalu Mengutamakan Kepentingan Perusahaan diatas Kepentingan Pribadi atau pihak lain.

5. *Fairness* (kewajaran)

Yaitu, perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh Pertama, Memberikan pelayanan kepada Nasabah secara adil sesuai ketentuan yang berlaku; Kedua, Peyampaian Informasi dan perlakuan pengembangan karir kepada pekerja dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban secara adil dan wajar.

2.1.3.3 Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Tata Kelola Bank Umum tanggal 17 Maret 2017 terbagi menjadi :

1. *Governance Structure*

Governance structure merupakan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga mampu menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan *stakeholders*. *Governance structure* meliputi:

a. Struktur tata kelola bank:

- 1) Organ Utama: RUPS, Komisaris dan Direksi
- 2) Organ Pendukung: Komite, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja pada Bank dan Audit Ekstrem.

b. Infrastruktur tata kelola bank:

- 1) Kebijakan dan prosedur bank
- 2) Sistem informasi manajemen
- 3) Tugas pokok dan fungsi struktur

2. *Governance Process*

Governance process merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya. *Governance process* mencerminkan efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholder bank. *Governance Process* Meliputi:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
- c. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank

- d. Pengelolaan SDM
 - e. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
 - f. Tata Kelola Teknologi Informasi
 - g. Pengelolaan Anak Perusahaan
3. *Governance Outcome*

Governance outcome menunjukkan outcome yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Implementasi *governance outcome* diwujudkan dalam bentuk :

- a. Kestinambungan Usaha

Direpresentasikan dengan tingkat kesehatan bank, kinerja keuangan, harga saham, kejadian pelanggaran.

- b. Perlindungan Nasabah

Dilaksanakan dalam bentuk transparansi informasi produk, kerahasiaan data dan layanan pengaduan nasabah.

- c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Diwujudkan dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*).

- d. Kemanfaatan Bank bagi Masyarakat dan Perekonomian Nasional

Berupa pengembangan *financial inclusion*, pembiayaan proyek pembangunan.

- e. *Sinergi Governance*

Komitmen *governance, governance structure, governance process* dan *governance outcome* harus merupakan satu rangkaian yang terintegrasi, komprehensif dan terstruktur sehingga *governance*

outcome mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure* mampu menciptakan tata kelola yang baik.

2.1.3.4 Manfaat Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Corporate Governance yang tidak efektif menjadi penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai perusahaan di Indonesia akhir-akhir ini. Penerapan *Corporate Governance* yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa depan.

Dengan melaksanakan *Corporate Governance*, menurut Forum *for Corporate Governance* (FCGI), ada beberapa manfaat antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus meningkatkan stakeholders value dan deviden.

Penerapan *Corporate Governance* yang baik memberi manfaat sebagai berikut:

1. Perbaikan dalam komunikasi
2. Minimasi potensial benturan

3. Fokus pada strategi-strategi utama
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
5. Kestinambungan manfaat (*sustainability of benefits*)
6. Promosi ciri korporat (*corporate image*)
7. Peningkatan kepuasan pelanggan
8. Perolehan kepercayaan investor

2.1.3.5 Tujuan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Tujuan diterapkannya GCG menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), adalah:

1. Mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing - masing organ perusahaan.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya asing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat

mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Dengan demikian, penerapan pelaksanaan prinsip GCG secara optimal akan mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang ada, dan pada gilirannya memberikan *value creation* semua pihak yang terkait dengan perusahaan..Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian prinsip yang universal tersebut akan menjadi pedoman untuk semua Negara atau perusahaan namun diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing. Prinsip –prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh OECD tersebut mencakup 5 (lima) hal berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The right of Stakeholders*)

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak - hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu :

- a. Hak memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan.
- b. Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham.
- c. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan yang berkala dan teratur.
- d. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- e. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi.
 - f. Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*)

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi - transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).

3. Peran pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*The Role of Stakeholders*)

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak - hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang - undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta berkesinambungan (*going concern*).

4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*)

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Informasi yang diungkapkan

harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal (kantor akuntan publik) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*The Responsibility of The Board*)

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara sepintas penerapan GCG di bank umum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tidak demikian halnya. Dalam banyak hal perilaku manajer dan pemilik bank merupakan faktor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan GCG. Dalam banyak hal Konsep *Agency Theory* yang sering digunakan dalam penerapan GCG tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam industri Perbankan. Untuk itu perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana seharusnya penerapan GCG pada industri perbankan dilakukan..

Dari segi operasional bank pada dasarnya mempunyai dua ciri khas yang tidak terdapat pada jenis *industry* lainnya yaitu Pertama, industri perbankan relatif kurang transparan (*opaque*) dibandingkan dengan *industry* lainnya karena adanya informasi asimetri dan Kedua, intervensi regulator sangat tinggi dalam perbankan

baik secara makro yaitu pada pasar jasa perbankan maupun secara mikro terhadap masing-masing bank.

2.1.4 Whistleblowing System

2.1.4.1 Pengertian Whistleblowing System

Whistleblowing system adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Dalam rangka melakukan pengawasan internal perusahaan, inisiatif ini membuat sebuah *whistleblowing system*. Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa mengenai kriteria kecurangan yang di laporkan yang meliputi 5W+1H, tindak lanjut dari laporan tersebut, *reward* dan perlindungan bagi sang pelapor atau *whistleblower*, dan hukuman atau sanksi untuk terlapor. Menurut Lavena (2016), “Sistem ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan”.

Sistem ini disediakan agar para karyawannya atau orang diluar perusahaan dapat melaporkan kejahatan yang dilakukan di internal perusahaan, pembuatan *whistleblowing system* ini untuk mencegah kerugian yang diderita perusahaan, serta untuk menyelamatkan perusahaan. Sistem yang dibangun ini kemudian disesuaikan ke dalam aturan perusahaan masing-masing, sehingga diharapkan

sistem ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan *corporate governance*.

Menurut Lestari (2016:71), “*Whistleblowing system* adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia”. Menurut Lestari (2016:74), “Indikator *whistleblowing system* adalah sebagai berikut:

$$\text{Whistleblowing System} = \frac{\text{Jumlah Item Yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Item Menurut KNKG}} \times 100\%$$

2.1.4.2 Jenis-Jenis *Whistleblowing System*

Menurut Siregar (2015:12), “*Whistleblowing* dikategorikan menjadi dua jenis yaitu”:

1. *Whistleblowing* internal
2. *Whistleblowing* eksternal.

Mekanisme *whistleblower* adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan terjadi di dalam suatu organisasi, di dalam perusahaan umumnya terdapat dua cara sistem pelaporan agar dapat berjalan dengan efektif, adapun dua cara pelaporan tersebut, yaitu:

1. Mekanisme Internal

Sistem pelaporan internal umumnya dilakukan melalui saluran komunikasi yang sudah baku dalam perusahaan. Sistem pelaporan internal *whistleblower* perlu ditegaskan kepada seluruh karyawan. Dengan demikian, karyawan dapat mengetahui otoritas yang dapat menerima

laporan. Berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan seorang karyawan yang berperan sebagai *whistleblower*. Misalnya: perilaku tidak jujur yang berpotensi atau mengakibatkan kerugian finansial perusahaan, pencurian uang atau aset, perilaku yang mengganggu atau merusak keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan kesehatan.

Aspek kerahasiaan identitas *whistleblower*, jaminan bahwa *whistleblower* dapat perlakuan yang baik, seperti tidak diasingkan atau dipecat, perlu dipegang oleh pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris. Dengan demikian, dalam sistem pelaporan internal, peran pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris sangat penting. Pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris juga berperan sebagai orang yang melindungi *whistleblower (protection officer)*.

Adapun infrastruktur dan mekanisme penyampaian laporan yaitu perusahaan harus menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk menyampaikan laporan pelanggaran, baik itu berupa *e-mail* dengan alamat khusus yang tidak dapat diterobos oleh bagian *Information Technology (IT)* perusahaan, atau kontak pos khusus yang hanya boleh diambil oleh petugas *whistleblowing system*, ataupun saluran telepon khusus yang akan dilayani oleh petugas khusus pula. Informasi mengenai adanya *hotline* ini haruslah diinformasikan secara meluas ke seluruh karyawan.

2. Mekanisme Eksternal

Dalam sistem pelaporan secara eksternal diperlukan lembaga di luar perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan *whistleblower*. Lembaga ini memiliki komitmen tinggi terhadap perilaku

yang mengedepankan standar legal, beretika, dan bermoral pada perusahaan.

2.1.4.3 Manfaat *Whistleblowing System*

Menurut Tung (2017:73), “Manfaat dari penyelenggaraan *whistleblowing system* yang baik antara lain adalah”:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi akibat dari pelanggaran, baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), *regulator*, dan masyarakat umum.
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu mengenai harga saham.

Tabel 2.1Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Utami (2019) Universitas Mataram	Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan <i>Whistleblowing System</i> sebagai Variabel Pemoderasi.	Komite Audit (X ₁) Audit Internal (X ₂) <i>Whistleblowing System</i> (X ₃)	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa komite audit dan <i>whistleblowing System</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.

			Pengungkapan Kecurangan (Y)		
2	Gusnardi (2011) Universitas Riau	Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan.	Komite Audit (X ₁) Pengendalian Internal (X ₂) Audit Internal (X ₃) Tata Kelola Perusahaan (X ₄) Pencegahan Kecurangan (Y)	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa komite audit dan tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
3	Cahyo (2017). Sekolah Tinggi Ekonomi Islam	Analisis Empiris Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Karakteristik Internal Audit, <i>Whistleblowing System</i> , Pengungkapan Kecurangan Terhadap Reaksi Pasar.	Komite Audit (X ₁) Audit Internal (X ₂) <i>Whistleblowing System</i> (X ₃) Pengungkapan Kecurangan (Y)	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa komite audit, audit Internal dan <i>whistleblowing System</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.

Sumber : Diolah Penulis 2020

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat.

2.3.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan Kecurangan

Komite audit independen yang terdiri setidaknya satu anggota memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi akan memperkecil kemungkinan

kecurangan. Semakin banyak staf komite audit yang memiliki keahlian keuangan maka efektivitas komite audit akan semakin meningkat. Hal ini terkait dengan peran dan tanggung jawab komite audit tentang pendeteksian dan pengungkapan kecurangan. Keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit akan membantu mendeteksi potensi kecurangan yang mungkin atau sudah terjadi melalui pemeriksaan laporan keuangan.

2.3.2 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan

Dengan adanya kerjasama penerapan Tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan visi perusahaan sebagai aparat pengawasan internal bertekad untuk ikut membantu terwujudnya *good corporate governance* di korporat, pelayanan publik, serta penanggulangan KKN melalui strategi pengawasannya yang bersifat preventif, represif, dan edukatif, sehingga dapat mendorong terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi katalisator untuk terwujudnya *good corporate governance* sehingga akan mengurangi potensi kecurangan.

2.3.3 Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Kecurangan

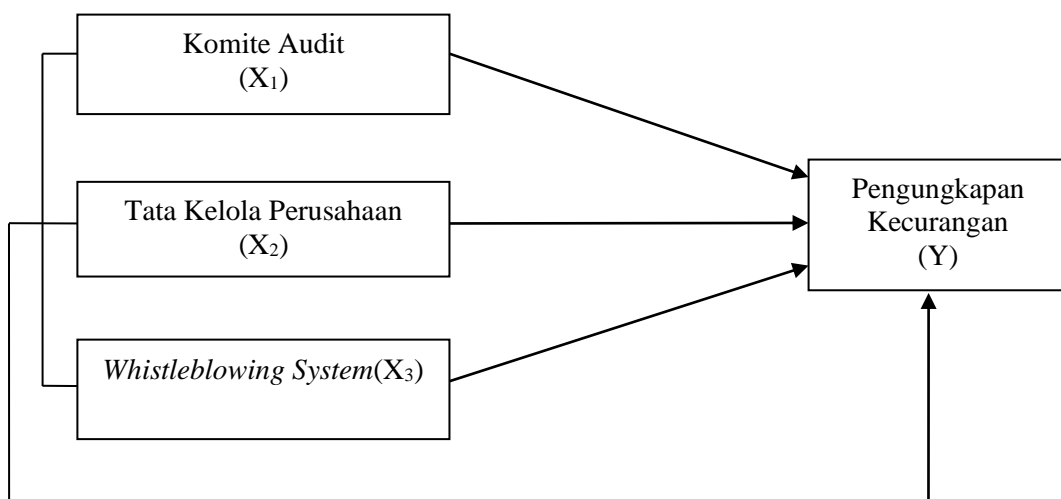
Salah satu tingkat efektivitas dari audit internal dapat dilihat dari keahlian keuangan kepala unit audit internal dan jumlah audit yang dilakukan dalam setahun . Audit internal juga melakukan tugasnya berpedoman kepada laporan – laporan yang masuk melalui *whistleblowing system*. Audit internal akan melakukan audit investigatif atas laporan – laporan yang terindikasi adanya praktik kecurangan (*fraud*). *Whistleblowing system* yang merupakan bagian dari pengendalian internal. Pelaksanaan pengendalian internal yang optimal mampu

mendeteksi indikasi praktik kecurangan secara dini.

2.3.4 Pengaruh Komite Audit, Tata Kelola Perusahaan dan *Whistleblowing System* Terhadap Pengungkapan Kecurangan

Semakin banyak komite audit independen dan memiliki keahlian keuangan maka efektivitas komite audit akan semakin meningkat. Keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit akan membantu mendeteksi potensi kecurangan yang mungkin atau sudah terjadi melalui pemeriksaan laporan keuangan. Tata Kelola Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi katalisator untuk terwujudnya *good corporate governance* sehingga akan mengurangi potensi kecurangan. Audit internal juga melakukan tugasnya dan berpedoman kepada laporan-laporan yang masuk melalui *whistleblowing system*. Audit internal akan melakukan audit investigatif atas laporan-laporan yang terindikasi adanya praktik kecurangan (*fraud*).

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah Penulis 2020

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual, maka hipotesis yang dapat dikemukakan sehubungan dengan permasalahan tersebut:

1. Komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minumanyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Tata kelola perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. *Whistleblowing system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Menurut Sugiyono (2015:115), “Pendekatan penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif asosiatif, dimana penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya”.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Mei 2020 sampai dengan Agustus 2020.

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan											
		Mei 2020			Juni 2020			Juli 2020			Agustus 2020		
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal		■	■	■								
3	Seminar Proposal					■							
4	Perbaikan Acc Proposal						■	■					
5	Pengolahan Data								■	■			
6	Penyusunan Skripsi										■	■	
7	Bimbingan Skripsi											■	■
8	Meja Hijau												■

Sumber : Diolah Penulis 2020

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (empat) variabel bebas yaitu: komite audit (X_1), tata kelola (X_2) dan *whistleblowing system* (X_3), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu pengungkapan kecurangan (Y).

3.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	Komite Audit (X_1)	Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. (Suginam, 2017:37)	$\frac{\text{Jumlah Anggota Independen}}{\text{Jumlah Anggota}} \times 100\%$ (Suginam, 2017:38)	Rasio
2	Tata Kelola Perusahaan (X_2)	Rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. (Sagara, 2015:62).	Ln Anggota Dewan Direksi (Sagara, 2015:65)	Rasio
3	<i>Whistleblowing System</i> (X_3)	Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (Lestari, 2016:71)	$\frac{\text{Jumlah Item Yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Item Menurut KNKG}} \times 100\%$ (Lestari, 2016:71)	Rasio
4	Pengungkapan Kecurangan (Y)	Sebagai suatu istilah yang umum, dan tidak mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu, yang dipilih oleh seorang	Jumlah Kasus Kecurangan Yang Dilaporkan Dalam Periode Tersebut (Albrecht, 2017:49)	Ordinal

		individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah (Albrecht, 2017:45).	
--	--	--	--

Sumber: Penulis (2020)

3.1 Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2015:118), Populasi merupakan area generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2019 yang berjumlah 14 perusahaan.

Tabel 3.3 Populasi Perusahaan

No	KODE	Nama Emiten
1	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera, Tbk
2	ALTO	PT. Tri Banyan Tirta, Tbk
3	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk
4	DLTA	PT. Delta Djakarta, Tbk
5	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk
6	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk
7	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk
8	MYOR	PT. Mayora Indah, Tbk
9	PSDN	PT. Prashida Aneka Niaga, Tbk
10	ROTI	PT. Nippon Indosari Corporindo, Tbk
11	SKBM	PT. Sekar Bumi, Tbk
12	SKLT	PT. Sekar Laut, Tbk
13	STTP	PT. Siantar Top, Tbk
14	ULTJ	PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk

Sumber : www.idx.co.id (2020)

3.1.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2015:120), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan tertentu tertentu. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2016-2019).
2. Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode pengamatan (2016-2019).
3. Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak mengalami kerugian dari tahun (2016-2019).

Tabel 3.4 Sampel Perusahaan

No	KODE	Nama Emiten	Kriteria			Sampel
			a	b	c	
1	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera, Tbk	√	X	√	X
2	ALTO	PT. Tri Banyan Tirta, Tbk	√	√	X	X
3	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk	√	√	√	1
4	DLTA	PT. Delta Djakarta, Tbk	√	√	X	X
5	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk	√	√	√	2
6	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk	√	√	√	3
7	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk	√	√	√	4
8	MYOR	PT. Mayora Indah, Tbk	√	√	√	5
9	PSDN	PT. Prashida Aneka Niaga, Tbk	√	√	X	X
10	ROTI	PT. Nippon Indosari Corporindo, Tbk	√	√	√	6
11	SKBM	PT. Sekar Bumi, Tbk	√	√	√	7
12	SKLT	PT. Sekar Laut, Tbk	√	√	√	8
13	STTP	PT. Siantar Top, Tbk	√	X	√	X
14	ULTJ	PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk	√	√	√	9

Sumber : www.idx.co.id (2020)

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 9 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

3.1.3 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2015:122), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.1.4 Sumber Data

Adapun sumber data tersebut tersedia dalam situs www.idx.co.id. Periode data penelitian ini meliputi data dari tahun 2016 sampai 2019.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data pendukung berupa buku-buku referensi untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang diteliti, jurnal, serta laporan yang dipublikasikan oleh Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.3 Teknik Analisis Data

3.3.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk melihat profil dari penelitian tersebut dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Statistik deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan suatu data yang dilihat dari mean, median, deviasi standar, nilai minimum, dan nilai maksimum.

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Distribusi data dikatakan normal apabila distribusi data berbentuk lonceng, yakni tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Dengan adanya uji normalitas ini, maka penelitian bisa digeneralisasikan pada populasi. Metode yang digunakan dalam melakukan uji normalitas adalah pendekatan histogram, pendekatan grafik, dan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* yaitu apabila nilai signifikan *Kolmogorov-Smirnov* $< 0,05$ maka data berdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terdapat korelasi (hubungan) diantara variabel bebas dalam model regresi. Apabila terdapat korelasi antara variabel bebas, maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan, apabila tidak terdapat korelasi antara variabel bebas, maka tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan melihat toleransi variabel dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Deteksi dilakukan dengan melihat nilai VIF dan nilai *tolerance*. Multikolinearitas tidak terjadi jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai sebuah istilah korelasi antara serangkaian pengamatan atau observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross-section*). Pengujian autokorelasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena pengamatan yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya dan juga dikarenakan residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *run test* yaitu :

- 1) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih kecil $<$ dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.
- 2) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar $>$ dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

3.3.3 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda yaitu suatu analisis yang menguji pengaruh komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system* terhadap pengungkapan kecurangan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Pengungkapan Kecurangan (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

- β = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)
- X_1 = Komite Audit (*Independent Variabel*)
- X_2 = Tata Kelola Perusahaan (*Independent Variabel*)
- X_3 = *Whistleblowing System* (*Independent Variabel*)
- ϵ = Error term

3.3.4 Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (uji t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas (komite audit, tata kelola dan *whistleblowing system*) terhadap variabel terikat (pengungkapan kecurangan). Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan, dilakukan uji t, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : b_1, b_2, = 0$ artinya komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

$H_a : b_1, b_2, \neq 0$ artinya komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system*, berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hipotesis untuk pengujian secara parsial adalah :

$\text{Sig} > \alpha 5\%$, artinya terima H_0 , tolak H_a

$\text{Sig} < \alpha 5\%$, artinya terima H_a , tolak H_0

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh komite audit, tata kelola dan *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada tingkat kepercayaan (*Confidence Interval*) atau level pengujian hipotesis 5% dengan uji F. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut ;

$H_0 : b_1, b_2 = 0$, artinya komite audit, tata kelola dan *whistleblowing system*, tidak berpengaruh signifikan perusahaan an secara simultan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

$H_a : b_1, b_2 \neq 0$, artinya komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system*, berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Apabila nilai R^2 suatu regresi mendekati satu, maka semakin baik regresi tersebut, dan sebaliknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Tentang Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Singkat Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Jakarta pertama kali dibuka pada tanggal 14 desember 1912, dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, didirikan di Batavia, pusat pemerintahan kolonial Belanda yang kita kenal sekarang dengan Jakarta. Bursa Efek Jakarta dulu disebut *Call-Efek*. Sistem perdagangannya seperti lelang, dimana tiap efek berturut-turut diserukan pemimpin “*Call*”, kemudian para pialang masing-masing mengajukan permintaan beli atau penawaran jual sampai ditemukan kecocokan harga, maka transaksi terjadi. Pada saat itu terdiri dari 13 perantara pedagang efek (makelar).

Bursa saat itu bersifat *demand-following*, karena para investor dan para perantara pedagang efek merasakan keperluan akan adanya suatu bursa efek di Jakarta. Bursa lahir karena permintaan akan jasanya sudah mendesak. Orang-orang Belanda yang bekerja di Indonesia saat itu sudah lebih dari tiga ratus tahun mengenal akan investasi dalam efek, dan penghasilan serta hubungan mereka memungkinkan mereka menanamkan uangnya dalam aneka rupa efek. Baik efek dari perusahaan yang ada di Indonesia maupun efek dari luar negeri. Sekitar 30 sertifikat (sekarang disebut *depository receipt*) perusahaan Amerika, perusahaan Kanada, perusahaan Belanda, perusahaan Prancis dan perusahaan Belgia.

Bursa Efek Jakarta sempat tutup selama periode perang dunia pertama, kemudian di buka lagi pada tahun 1925. Selain Bursa Efek Jakarta, pemerintah kolonial juga mengoperasikan bursa parallel di Surabaya dan Semarang. Namun kegiatan bursa ini di hentikan lagi ketika terjadi pendudukan tentara Jepang di Batavia.

Aktivitas di bursa ini terhenti dari tahun 1940 sampai 1951 di sebabkan perang dunia II yang kemudian disusul dengan perang kemerdekaan. Baru pada tahun 1952 di buka kembali, dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda di nasionalisasikan pada tahun 1958. Meskipun pasar yang terdahulu belum mati karena sampai tahun 1975 masih ditemukan kurs resmi bursa efek yang dikelola Bank Indonesia.

Bursa Efek Jakarta kembali dibuka pada tanggal 10 Agustus 1977 dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun mulai meningkat seiring dengan perkembangan pasar finansial dan sektor swasta yang puncak perkembangannya pada tahun 1990. Pada tahun 1991, bursa saham diswastanisasi menjadi PT. Bursa Efek Jakarta dan menjadi salah satu bursa saham yang dinamis di Asia. Swastanisasi bursa saham ini menjadi PT. Bursa Efek Jakarta mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

Bursa efek terdahulu bersifat *demand-following*, namun setelah tahun 1977 bersifat *supply-leading*, artinya bursa dibuka saat pengertian mengenai bursa pada masyarakat sangat minim sehingga pihak BAPEPAM harus berperan aktif langsung dalam memperkenalkan bursa.

Pada tahun 1977 hingga 1978 masyarakat umum tidak atau belum merasakan kebutuhan akan bursa efek. Perusahaan tidak antusias untuk menjual sahamnya kepada masyarakat. Tidak satupun perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya pada periode ini. Baru pada tahun 1979 hingga 1984 dua puluh tiga perusahaan lain menyusul menawarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Namun sampai tahun 1988 tidak satu pun perusahaan baru menjual sahamnya melalui Bursa Efek Jakarta.

Untuk lebih mengairahkan kegiatan di Bursa Efek Jakarta, maka pemerintah telah melakukan berbagai paket deregulasi, antarlain seperti: paket Desember 1987, paket Oktober 1988, paket Desember 1988, paket Januari 1990, yang prinsipnya merupakan langkah-langkah penyesuaian peraturan-peraturan yang bersifat mendorong tumbuhnya pasar modal secara umum dan khususnya Bursa Efek Jakarta.

Setelah dilakukan paket-paket deregulasi tersebut Bursa Efek Jakarta mengalami kemajuan pesat. Harga saham bergerak naik cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tenang. Perusahaan-perusahaan pun akhirnya melihat bursa sebagai wahana yang menarik untuk mencari modal, sehingga dalam waktu relative singkat sampai akhir tahun 1997 terdapat 283 emiten yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.

Tahun 1995 adalah tahun Bursa Efek Jakarta memasuki babak baru, karena pada tanggal 22 Mei 1995 Bursa Efek Jakarta meluncurkan *Jakarta Automated Trading System* (JATS). JATS merupakan suatu sistem perdagangan manual. Sistem baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi

yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan di banding sistim perdagangan manual.

Pada bulan Juli 2000, Bursa Efek Jakarta merupakan perdagangan tanpa warkat (*ckripess trading*) dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan menghindari peristiwa saham hilang dan pemalsuan saham, serta untuk mempercepat proses penyelesaian transaksi.

Tahun 2001 Bursa Efek Jakarta mulai menerapkan perdagangan jarak jauh (*Remote Trading*), sebagai upaya meningkatkan akses pasar, efisiensi pasar, kecepatan dan frekuensi perdagangan.

Tahun 2007 menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan Pasar Modal Indonesia. Dengan persetujuan para pemegang saham kedua bursa, BES digabungkan ke dalam BEJ yang kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan meningkatkan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2008, Pasar Modal Indonesia terkena imbas krisis keuangan dunia menyebabkan tanggal 8-10 Oktober 2008 terjadi penghentian sementara perdagangan di Bursa Efek Indonesia.. IHSG, yang sempat menyentuh titik tertinggi 2.830,26 pada tanggal 9 Januari 2008, terperosok jatuh hingga 1.111,39 pada tanggal 28 Oktober 2008 sebelum ditutup pada level 1.355,41 pada akhir tahun 2008. Kemerosotan tersebut dipulihkan kembali dengan pertumbuhan 86,98% pada tahun 2009 dan 46,13% pada tahun 2010.

Pada tanggal 2 Maret 2009 Bursa Efek Indonesia meluncurkan sistim perdagangan baru yakni *Jakarta Automated Trading System Next Generation* (JATS Next-G), yang merupakan pengganti sistim JATS yang beroperasi sejak Mei 1995. sistem semacam JATS Next-G telah diterapkan di beberapa bursa

negara asing, seperti Singapura, Hong Kong, Swiss, Kolombia dan Inggris. JATS Next-G memiliki empat mesin (engine), yakni: mesin utama, back up mesin utama, disaster recovery centre (DRC), dan back up DRC. JATS Next-G memiliki kapasitas hampir tiga kali lipat dari JATS generasi lama .

Demi mendukung strategi dalam melaksanakan peran sebagai fasilitator dan regulator pasar modal, BEI selalu mengembangkan diri dan siap berkompetisi dengan bursa-bursa dunia lainnya, dengan memperhatikan tingkat risiko yang terkendali, *instrument* perdagangan yang lengkap, sistem yang andal dan tingkat likuiditas yang tinggi. Hal ini tercermin dengan keberhasilan BEI untuk kedua kalinya mendapat penghargaan sebagai “The Best Stock Exchange of the Year 2010 in Southeast Asia. Saat ini, BEI mempunyai tujuh macam indeks saham:

1. IHSG, menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi Indeks.
2. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sektor.
3. Indeks LQ45, menggunakan 45 saham terpilih setelah melalui beberapa tahapan seleksi.
4. Indeks Individual, yang merupakan Indeks untuk masing-masing saham didasarkan harga dasar.
5. Jakarta Islamic Index, merupakan Indeks perdagangan saham syariah.
6. Indeks Papan Utama dan PapanPengembang, indeks yang didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di BEI yaitu kelompok Papan Utama dan Papan Pengembangan.
7. Indeks Kompas 100, menggunakan 100 saham.

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal dapat dilihat sebagai berikut:

1. 14 Desember 1912

Tahun inilah awal dimana Bursa Efek pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh Pemerintah yang berkuasa saat itu, yaitu pemerintah Hindia Belanda. Sebagai tahap awal, perusahaan sekuritas yang menjadi pilang untuk para investor, baru berdiri 13 perusahaan saja, di antaranya Fa. Dunlop & Kolf dan Fa. Gebroeders.

2. 1914 – 1918

Dan akibat dari perang dunia, tepatnya Perang Dunia ke I waktu itu, maka Bursa Efek di Batavia ditutup untuk sementara waktu.

3. 1925 – 1942

Seiring dengan kondusifnya keadaan pemerintahan hindia Belanda, maka antara tahun 1925-1942 Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali dan bersamaan dengan dengan dibukanya bursa di Jakarta, maka Bursa Efek di Semarang dan Surabaya juga mulai dibuka.

4. Awal 1939

Sama halnya pada kurun waktu antara tahun 1914 – 1918 yang mana waktu itu bursa efek di Batavia ditutup, maka pada tahun 1939 juga terjadi hal yang sama, hanya saja isu politiknya kala ini adalah karena efek dari Perang Dunia II. Dan bursa yang mengalami dampaknya adalah Bursa Efek di Semarang dan Surabaya.

5. 1942 – 1952

Lagi-lagi karena isu perang Dunia. Bursa Efek di Jakarta akhirnya ditutup kembali selama berlangsungnya Perang Dunia II.

6. 1956

Akibat dijalankannya program nasionalisasi perusahaan Belanda, perkembangan Bursa Efek semakin tidak tampak karena sempat tidak aktif lagi. Jadi setelah ditutup karena efek perang, suara hilir mudik investor makin tidak nampak karena program tersebut.

7. 1956 – 1977

Berbeda dengan sebelumnya, di tahun-tahun ini walau bursa buka, perdagangan di Bursa Efek vakum.

8. 10 Agustus 1977

Bursa mulai hidup kembali setelah diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Sebagai perusahaan, BEJ saat itu dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal) – sekarang sudah diganti OJK. Diresmikannya kembali pasar modal ini juga dibarengi dengan go public / IPO dari PT Semen Cibinong selaku emiten pertama waktu itu. Ini sekaligus menjadi jalan perkembangan Bursa Efek Indonesia yang baru.

9. 1977 – 1987

Transaksi di Bursa Efek tampak seperti tak ada aktifitasnya dan bisa kita katakan tidak nampak perkembangannya. Jumlah emiten yang terdaftar hingga 1987 bahkan baru berjumlah 24. Karena kurang popolernya bursa efek saat itu dan masih enggan nya perusahaan mendaftarkan usahanya

maka banyak masyarakat kemudian lebih memilih instrumen perbankan dibanding instrumen Pasar Modal.

10. 1987

Sebagai inisiatif pemerintah menghidupkan pasar modal, maka lahir kebijakan PAKDES 87 atau Paket Desember 1987 yang mana memberikan kemudahan bagi para perusahaan untuk melakukan IPO atau Penawaran Umum Perdana dan juga investor asing yang diberi izin berinvestasi di Indonesia.

11. 1988 – 1990

Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal akhirnya diluncurkan. Dan semenjak pintu BEJ terbuka untuk umum, termasuk asing, maka tampaklah aktivitas transaksi di bursa meningkat.

12. 2 Juni 1988

Muncul yang namanya Bursa Paralel Indonesia (BPI) dan mulai beroperasi 2 Juni 1988 tersebut. Badan tersebut dikelola oleh PPUE atau Persatuan Perdagangan Uang dan Efek, sedangkan organisasinya terdiri dari dealer dan broker.

13. Desember 1988

Bisa dibilang jilid 2 lahirnya PAKDES, tapi kali ini dinamakan dengan PAKDES 88 yang mana isi kebijakannya memberikan kemudahan perusahaan untuk melakukan go public dan kebijakan lain yang pro bagi pertumbuhan pasar modal di Indonesia.

14. 16 Juni 1989

Di tahun ini sejarah baru perkembangan bursa di Indonesia dimana di tahun inilah Bursa Efek Surabaya (BES) mulai aktif dan dinahkodai oleh perusahaan bernama PT Bursa Efek Surabaya.

15. 13 Juli 1992

BEJ terkena dampak swastanisasi dan kemudian BAPEPAM sendiri berubah peran menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Dan tepat di tanggal ini juga menjadi HUT BEJ.

16. 22 Mei 1995

Di tahun ini perdagangan di bursa efek Jakarta mulai menggunakan sistem canggih yang disebut dengan Sistem Otomasi perdagangan JATS (Jakarta Automated Trading Systems).

17. 10 November 1995

Sebagai inisiatif dan guna menjamin berjalannya aktifitas pasar modal dengan baik di Indonesia maka pemerintah melahirkan Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 yani tentang Pasar Modal.

18. 1995

Bursa Paralel Indonesia melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya

19. 2000

Sistem Perdagangan dengan Tanpa Warkat (scripless trading) akhirnya mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia.

20. 2002

Seiring dengan perkembangan zaman dan tingginya mobilisasi warga Indonesia, maupun asing, BEJ mulai menerapkan sistem perdagangan

jarak jauh (remote trading). Jadi, dengan sistem ini tidak perlu lagi langsung ke broker untuk membeli atau menjual saham.

21. 2007

Tahun inilah awal berdirinya BEI, yakni dengan digabungkannya Bursa Efek Surabaya (BES) dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ) maka di Indonesia hanya dikenal satu perusahaan bursa, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI).

22. 2011

Jumlah perusahaan yang melakukan IPO di tahun 2011 adalah yang terbanyak sepanjang 10 tahun terakhir, yakni sebanyak 25 emiten. Ini sebagai contoh mulainya BEI berkembang.

23. 6 Januari 2014

Perubahan satuan lot yang baru mulai diberlakukan, dari sebelumnya 500 lembar saham per lot menjadi 100 lembar saja dalam tiap 1 lotnya.

24. 3 Januari 2017

Sistem auto rejection atau penolakan otomatis oleh JATS mengalami perubahan, yakni harga saham antara Rp 50-Rp 200 maka maksimal naik dan turunnya adalah 35 persen saja dalam sehari. Adapun harga saham antara Rp Rp 200-Rp 5.000 maka batas naik-turunnya 25 persen dalam sehari.

25. 19 Februari 2018

IHSG mencatat sejarah baru poin tertingginya yang berada di level 6.689,29 yang merupakan poin tertinggi yang dicapai selama bursa saham di Indonesia didirikan.

4.1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Perusahaan

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

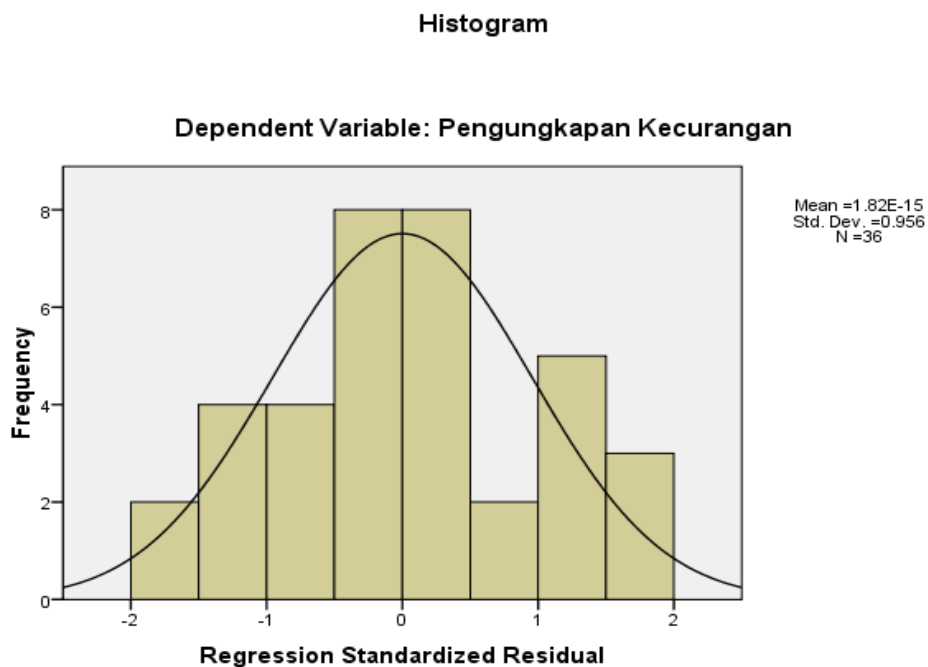
2. Misi Perusahaan

Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

4.1.2 Pengujian Asumsi Klasik

4.1.2.1 Uji Normalitas data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal.

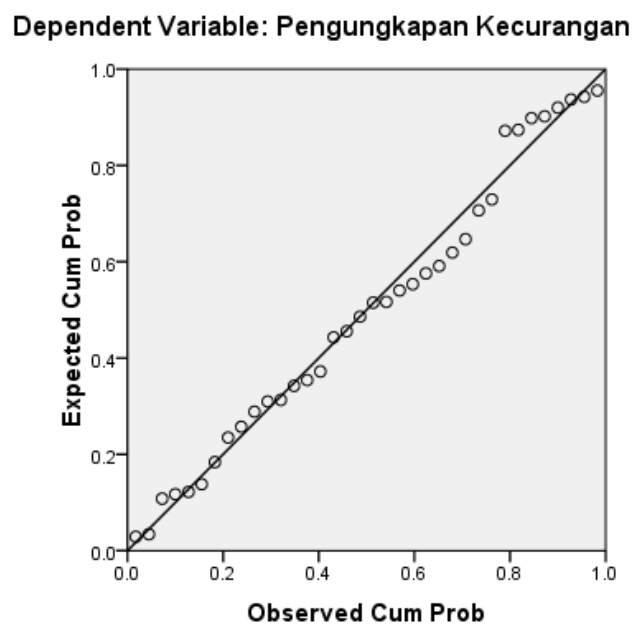


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Untuk lebih memastikan apakah data disepanjang garis diagonal tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov Smirnov (1 Sample KS) yakni dengan melihat data residualnya apakah distribusi normal atau tidak. Jika nilai $Asym.sig (2-tailed) > taraf\ nyata (\alpha = 0.05)$ maka data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.1
Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.82612527
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.072
	Negative	-.105
Kolmogorov-Smirnov Z		.628
Asymp. Sig. (2-tailed)		.826
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Pada tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data tersebut, besar nilai signifikan *kolmogorov Smirnov* adalah 0,826 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 ($p= 0,826 > 0,05$). Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai – nilai observasi data telah terdistribusi secara normal.

4.1.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear diantara variabel bebas dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.669	4.025	3.645	.001		
	Komite Audit	-.952	.470	-2.027	.031	.321	3.114
	Tata Kelola Perusahaan	-.700	.159	-4.395	.000	.926	1.080
	Whistleblowing System	-.888	.404	-2.199	.035	.318	3.148

a. Dependent Variable: Pengungkapan Kecurangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak terkena masalah multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$. Untuk variabel komite audit memiliki nilai tolerance sebesar 0,321 dan VIF sebesar 3,114. Variabel tata kelola perusahaan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,926 dan VIF sebesar 1,080. Variabel *whistleblowing system* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,318 dan VIF sebesar 3,148.

4.1.2.3 Uji Autokorelasi

“Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan periode $(t-1)$ atau sebelumnya. Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji *run test*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *run test* yaitu :

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil $<$ dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.
2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar $>$ dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 4.3
Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00087
Cases $<$ Test Value	18
Cases \geq Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	15
Z	-1.184
Asymp. Sig. (2-tailed)	.237

a. Median

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,237 >$ dari $0,05$, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.1.3 Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Tabel 4.4
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.669	4.025	3.645	.001		
	Komite Audit	-.952	.470	-2.027	.031	.321	3.114
	Tata Kelola Perusahaan	-.700	.159	-4.395	.000	.926	1.080
	Whistleblowing System	-.888	.404	-2.199	.035	.318	3.148

a. Dependent Variable: Pengungkapan Kecurangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut $Y = 14,669 - 0,952 X_1 - 0,700 X_2 - 0,888 X_3 + e$.

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

1. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai pengungkapan kecurangan (Y) adalah sebesar 14,669.
2. Jika terjadi peningkatan komite audit 1, maka pengungkapan kecurangan (Y) akan menurun sebesar 0,952.
3. Jika terjadi peningkatan tata kelola perusahaan sebesar 1, maka pengungkapan kecurangan (Y) akan menurun sebesar 0,700.

4. Jika terjadi peningkatan *whistleblowing system* sebesar 1, maka pengungkapan kecurangan (Y) akan menurun sebesar 0,888.

4.1.4 Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

4.1.4.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F (uji simultan) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara simultan. Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* ($=0,05$). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.5
Uji Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.255	3	6.085	8.152	.000^a
	Residual	23.887	32	.746		
	Total	42.142	35			

a. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit

b. Dependent Variable: Pengungkapan Kecurangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 8,152 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,90 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.

4.1.4.2 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Parsial (t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual menerangkan variasi pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 4.6
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.669	4.025	3.645	.001		
	Komite Audit	-.952	.470	-2.027	.031	.321	3.114
	Tata Kelola Perusahaan	-.700	.159	-4.395	.000	.926	1.080
	Whistleblowing System	-.888	.404	-2.199	.035	.318	3.148

a. Dependent Variable: Pengungkapan Kecurangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa:

1. Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan kecurangan.

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} -2,027 < t_{tabel} 2,036$ dan signifikan $0,031 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan komite audit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan.

2. Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan kecurangan.

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} -4,395 < t_{tabel} 2,036$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan.

3. Pengaruh *whistleblowing system* terhadap pengungkapan kecurangan.

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} -2,199 < t_{tabel} 2,036$ dan signifikan $0,035 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan *whistleblowing*

system berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan.

4.1.4.3 Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika determinasi (R^2) semakin besar atau mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas semakin besar pengaruhnya terhadap variabel terikat.

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.658 ^a	.433	.380	.86398

a. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit

b. Dependent Variable: Pengungkapan Kecurangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa angka *Adjusted R Square* 0,380 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 38,0% pengungkapan kecurangan dapat diperoleh dan dijelaskan oleh komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system*. Sedangkan sisanya $100\% - 38,0\% = 62,0\%$ dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti pengendalian internal, audit internal dan lain-lain.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan Kecurangan

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} -2,027 < t_{tabel} 2,036$ dan signifikan $0,031 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan komite audit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan. Hasil

penelitian ini sesuai dengan penelitian Utami (2019), yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan. Komite audit yang terdiri setidaknya satu anggota memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi akan memperkecil kemungkinan kecurangan. Semakin banyak komite audit yang memiliki keahlian keuangan maka efektivitas komite audit akan semakin meningkat. Hal ini terkait dengan peran dan tanggung jawab komite audit tentang pelaporan keuangan dan manajemen. Keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit akan membantu mendeteksi potensi kecurangan yang mungkin atau sudah terjadi melalui pemeriksaan laporan keuangan. Perusahaan juga harus meningkatkan jumlah staf komite audit, sehingga semakin efektif dalam pengungkapan kecurangan sedini mungkin dan kasus kecurangan dapat diperkecil.

4.2.2 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} -4,395 < t_{tabel} 2,036$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Gusnardi (2011), yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan. Dengan adanya kerjasama penerapan Tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan visi perusahaan sebagai aparat pengawasan internal bertekad untuk ikut membantu terwujudnya *good governance* di korporat, pelayanan publik, serta penanggulangan KKN melalui strategi pengawasannya

yang bersifat preventif, represif, dan edukatif, sehingga dapat mendorong terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi katalisator untuk terwujudnya *Good Governance* sehingga akan mengurangi potensi kecurangan.

4.2.3 Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pengungkapan Kecurangan

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} -2,199 < t_{tabel} 2,036$ dan signifikan $0,035 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan *whistleblowing system* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Utami (2019), yang menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan. Salah satu tingkat efektivitas dari audit internal dapat dilihat dari keahlian keuangan kepala unit audit internal dan jumlah audit yang dilakukan dalam setahun. Audit internal juga melakukan tugasnya audit internal juga berpedoman kepada laporan – laporan yang masuk melalui *whistleblowing system*. Audit internal akan melakukan audit investigatif atas laporan – laporan yang terindikasi adanya praktik kecurangan (*fraud*). *Whistleblowing system* yang merupakan bagian dari pengendalian internal. Pelaksanaan pengendalian internal yang optimal mampu mendeteksi indikasi praktik kecurangan secara dini.

4.2.4 Pengaruh Komite Audit, Tata Kelola Perusahaan dan *Whistleblowing System* Terhadap Pengungkapan Kecurangan

Hasil menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 8,152 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,90 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Utami (2019) dan Gusnardi (2011), yang menunjukkan bahwa komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. Semakin banyak komite audit yang memiliki keahlian keuangan maka efektivitas komite audit akan semakin meningkat. Keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit akan membantu mendeteksi potensi kecurangan yang mungkin atau sudah terjadi melalui pemeriksaan laporan keuangan. Tata Kelola Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi katalisator untuk terwujudnya *Good Governance* sehingga akan mengurangi potensi kecurangan. Audit internal juga melakukan tugasnya audit internal juga berpedoman kepada laporan-laporan yang masuk melalui *whistleblowing system*. Audit internal akan melakukan audit investigatif atas laporan-laporan yang terindikasi adanya praktik kecurangan (*fraud*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibuat pada masing-masing bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang menyangkut penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} -2,027 < t_{tabel} 2,036$ dan signifikan $0,031 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan komite audit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan. Keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit akan membantu mendeteksi potensi kecurangan yang mungkin atau sudah terjadi melalui pemeriksaan laporan keuangan. Perusahaan juga harus meningkatkan jumlah staf komite audit, sehingga semakin efektif dalam pengungkapan kecurangan sedini mungkin dan kasus kecurangan dapat diperkecil.
2. Tata kelola perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} -4,395 < t_{tabel} 2,036$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan. Dengan

adanya kerjasama penerapan Tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan visi perusahaan sebagai aparat pengawasan internal bertekad untuk ikut membantu terwujudnya good governance di korporat, pelayanan publik, serta penanggulangan KKN melalui strategi pengawasannya yang bersifat preventif, represif, dan edukatif, sehingga dapat mendorong terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi katalisator untuk terwujudnya Good Governance sehingga akan mengurangi potensi kecurangan.

3. *Whistleblowing system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} -2,199 < t_{tabel} 2,036$ dan signifikan $0,035 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan *whistleblowing system* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan kecurangan. *Whistleblowing system* yang merupakan bagian dari pengendalian internal. Pelaksanaan pengendalian internal yang optimal mampu mendeteksi indikasi praktik kecurangan secara dini. Semakin efektif *Whistleblowing system* pada suatu perusahaan, maka semakin efektif pula suatu pendeteksian kecurangan dilakukan sehingga dapat memperkecil potensi kecurangan yang akan terjadi.
4. Komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $F_{hitung} 8,152 > F_{tabel} 2,90$ dan signifikan

0,000 < 0,05, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.

5.2 Saran

Dengan segala keterbatasan yang telah di ungkapkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Kualitas komite audit harus lebih ditingkatkan dan begitu pula dengan keterlibatan komite audit dalam aktivitas perusahaan kualitas pertanyaan yang diajukan komite audit pada manajemen juga harus lebih baik lagi untuk meningkatkan efektivitas dari komite audit.
2. Dalam pencapaian tujuan *good corporate governance* sendiri perusahaan harus lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi, dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus ada kejelasan fungsi dewan komisaris dan kepatuhannya terhadap anggaran dasar, adanya peraturan terhadap hak-hak pemegang saham, melakukan kerahasiaan hasil audit dalam sistem audit. kepatuhan terhadap pedoman pengungkapan informasi perusahaan lebih ditingkatkan, dan tidak boleh ada penggunaan keuntungan perusahaan untuk kepentingan pemegang saham untuk kepentingan politik.
3. Bagi perusahaan untuk meningkatkan penerapan agar meningkatkan dimensi aspek operasional yaitu dengan cara menjelaskan kepada karyawan tentang tata cara penggunaan nama samaran/anonim dalam pelaporan pelanggaran untuk memberikan kemudahan bagi pelapor

menyampaikan pelaporan pelanggaran sehingga dapat mencegah pelaporan ke pihak luar perusahaan dan sosialisasi pentingnya whistleblowing system sebaiknya dilakukan secara terus menerus.

4. Untuk perusahaan atau organisasi, perlu diupayakan untuk mendeteksi kecurangan melalui pencegahan, mencegah adalah akar penyebab persoalan kecurangan. Jika belum atau tidak dapat mencegah, perusahaan atau organisasi hendaknya dapat segera mendeteksi, menginvestigasi, dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Untuk peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan data panel.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Albrecht, W. S., C. O. Albrecht and C. C. Zimbelman. 2017. *Fraud Examination, 4th Edition (Cengage Learning: Mason, Ohio)*.
- Cahyo, Mohe Nur. (2017). Analisis Empiris Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Karakteristik Internal Audit, *Whistleblowing System*, Pengungkapan Kecurangan Terhadap Reaksi Pasar.
- Cressey, Donad R 2015. *Other People Money, Study in The Social Psichology of Embezzlement*. Monclain, JN: Patterson Smith.
- Gusnardi. 2011. Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Ekuitas*, 15 (1), 130-146.
- Lavena, C.F. 2016. Whistle-Blowing: Individual and Organizational Determinants of the Decision to Report Wrongdoing in the Federal Government. *The American Review of Public Administration*, 46 (1), 113-136
- Noviani, D.P. & Sambharakreshna, Y. 2016. Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan. *JAFFA*, 2 (2), 61 – 67.
- Sugiyono. 2015. *Statistika untuk Penelitian*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan. Alfabeta, Bandung.
- Tung, L. C. 2017. *The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention of Engineering Students*. Doctor of Philosophy Cityu University of Hongkong.
- Utami, Luh. (2019). Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan *Whistleblowing System* sebagai Variabel Pemoderasi.

JURNAL :

- Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). *Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model*. *Business and Management Horizons*, 5(2), 49-59
- Andika, R. (2019). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*. *JUMANT*, 11(1), 189-206.

- Ardian, N. (2019). *Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB*. JEpa, 4(2), 119-132.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). “*Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat*”. *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Daulay, M. T. (2019). *Effect of Diversification of Business and Economic Value on Poverty in Batubara Regency*. *KnE Social Sciences*, 388-401.
- Febrina, A. (2019). *Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak Di Instagram (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek)*. *Jurnal Abdi Ilmu*, 12(1), 55-65.
- Hidayat, R. (2018). *Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia*. JEpa, 3(2), 133-149.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Lestari, I.T., Gunawan, H & Purnamasari, P. 2016. Pengaruh Peran Audit Internal dan Efektivitas *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Fraud (Survei pada Bank Umum Syariah di kota Bandung, Jawa Barat). *Proceding Akuntansi*, 2 (1), 2205-212.
- Malikhah, I. (2019). *Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi*. *Jumant*, 11(1), 67-80.
- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). *Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour*. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Pramono, C. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching*. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- Sagara, Y. 2015. Profesionalisme Internal Auditor dan Intensi Melakukan Whistleblowing System. *Jurnal Liquidity*, 2 (1), 34-44.
- Sari, M. M. (2019). *Faktor-Faktor Profitabilitas Di Sektor Perusahaan Industri Manufaktur Indonesia (Studi Kasus: Sub Sektor Rokok)*. *Jumant*, 11(2), 61-68.

- Siregar, S. V., dan Tenoyo.B. 2015. Fraud awareness survey of private sector in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 22 (3), 329-346.
- Siregar, N. (2018). *Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli Medan*. *JUMANT*, 8(2), 87-96.
- Suginam. 2017. Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud. *Riset dan Jurnal Akuntansi*, 1 (1), 22-28.
- Yanti, E. D., & Sanny, A. *The Influence of Motivation, Organizational Commitment, and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas Pembangunan Panca Budi*.